

ABSTRAK

Penyebaran pandemic *Corona Virus Disease* 2019 sampai dengan saat ini masih belum bisa terkendali, dimana hal tersebut sebagai dasar pijakan pemerintah dalam membuat kebijakan guna mengatur masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat selain itu ada upaya pemerintah dalam membatasi aktivitas masyarakat agar mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sehingga dalam hal ini pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang banyak sekali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Permasalahannya bagaimana implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ditinjau dari instruksi menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *corona virus disease* 2019 di wilayah jawa dan bali dan sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ditinjau dari instruksi menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *corona virus disease* 2019 di wilayah jawa dan bali. metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Kesimpulannya Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali (Studi Kasus di Kabupaten Karawang) diantaranya 1) Kegiatan work from home dan study from home; 2) Pemadaman Lampu dan Penutupan Sebagian Jalan Kabupaten Karawang; 3) Pembatasan jam operasional supermarket atau toko swalayan dan kegiatan keagamaan. Dan Pelaksanaan Kebijakan PPKM di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan Kebijakan PPKM yaitu dalam pelaksanaannya, dikarenakan luas wilayah Kabupaten Karawang yang sangat luas sehingga pemerintah belum dapat melaksanakan kebijakan PPKM secara menyeluruh ke berbagai daerah yang berada di Kabupaten Karawang, serta masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin.

Kata Kunci: Efektivitas, PPKM, Covid-19

ABSTRACT

The spread of the Corona Virus Disease 2019 pandemic has not yet been controlled, which is the basis for the government to make policies to regulate the community in implementing strict health protocols. In addition, there are government efforts to limit community activities in order to prevent the spread of Corona Virus Disease 2019 so that in In this case, the government implements a policy of implementing emergency community activity restrictions (PPKM) which raises many pros and cons in the community. The problem is how to implement the policy of implementing restrictions on emergency community activities in terms of the instruction of the minister of home affairs number 15 of 2021 regarding the implementation of restrictions on emergency community activities for corona virus disease 2019 in the Java and Bali regions and the extent to which the level of effectiveness of the policy of implementing restrictions on emergency community activities is seen from the minister's instructions. number 15 of 2021 concerning the implementation of restrictions on emergency community activities for the corona virus disease 2019 in the Java and Bali regions. the research method uses a normative juridical approach, In conclusion, the implementation of the policy for the implementation of restrictions on emergency community activities in terms of the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 15 of 2021 concerning the implementation of restrictions on emergency community activities for Corona Virus Disease 2019 in the Java and Bali regions (Case Study in Karawang Regency) including 1) Work from home and study from activities. home; 2) Lighting out and Partial Closure of Karawang Regency Roads; 3) Restrictions on operating hours of supermarkets or convenience stores and religious activities. And the implementation of the PPKM policy in Karawang Regency has been going well but not optimally. The obstacle faced during the implementation of the PPKM Policy is in its implementation, due to the vast area of the Karawang Regency so that the government has not been able to implement the PPKM policy as a whole to various areas in Karawang Regency, as well as people who still do not comply with health protocols with discipline.

Keywords: *Effectiveness, PPKM, Covid-19*